**ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI SIAK DALAM
PERKARA PERDATA NOMOR 37/Pdt.G/2018/PN.SAK TENTANG
PENETAPAN GANTI KERUGIAN PEMBANGUNAN UNTUK
KEPENTINGAN UMUM**

Maryam Khairunnisa

Fakultas Hukum Universitas Riau

E-mail: nissakhairunnisaannisa@gmail.com

Dr. Rahmad Hendra, S.H.,M.Kn

Fakultas Hukum Universitas Riau

E-mail: rahmad.hendra@lecturer.unri.ac.id

Rika Lestari, S.H., M.Hum

Fakultas Hukum Universitas Riau

E-mail: rika.lestari@lecturer.unri.ac.id

Dr. Hengki Firmanda, SH., LLM.

Fakultas Hukum Universitas Riau

E-mail: hengki.firmanda@lecturer.unri.ac.id

Dr. Maryati Bachtiar, SH.,M.Kn.

Fakultas Hukum Universitas Riau

E-mail: maryati.bachtiar@lecturer.unri.ac.id

Abstract

Abstract: This research related to the analysis of the decision of the judge of the Siak District court in civil case number 37/Pdt.G/2018/PN.Sak regarding the determination of compensation for development in the public interest. Based on this decision, there are many things that need to be studied because they are not in accordance with the provisions of existing laws and regulations. Therefore, it is necessary to study stimulative the first consideration of the judge in the decision of the Siak District court in civil case number 37/Pdt.G/2018/PN.Sak regarding the determination of compensation for development for the public interest.. Second, the suitability of the judge's decision to the theory of justice according to the Siak district court in civil case number 37/Pdt.G/2018/PN.Sak regarding the determination of compensation for development in the public interest.

Keywords: Judge's Decision - Compensation - Public Interes

A. PENDAHULUAN

Tanah merupakan modal dasar pembangunan, tanah juga merupakan faktor penting dalam kehidupan masyarakat yang umumnya menggantungkan kehidupannya pada tanah yang berarti tanah tersebut merupakan kebutuhan pokok bagi manusia, di samping kebutuhan pokok tanah memiliki hubungan yang bersifat abadi dengan negara dan rakyat¹. Salah satu upaya pemerintahan dalam rangka pembangunan nasional adalah pembangunan untuk kepentingan umum, seperti pembangunan jalan raya, pemukiman rakyat dan sebagainya.

Mencegah terjadinya permasalahan hukum mengenai tanah dan memberikan kepastian hukum bagi setiap orang atau badan hukum, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Hal ini mengingat pada ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 yang menyatakan bahwa setiap hak atas tanah memiliki fungsi sosial².

Fungsi sosial yang melekat pada hak milik atas tanah tidak berarti pemegang hak milik harus selalu bersedia melepaskan haknya tersebut begitu saja ketika berhadapan dengan kepentingan masyarakat yang lebih luas. Harus ada keseimbangan antara kepentingan masyarakat yang lebih luas dengan kepentingan pemegang hak atas tanah. Ketika pemegang hak milik atas tanah harus melepaskan haknya untuk kepentingan umum, maka harus ada ganti rugi yang layak sehingga pemegang hak atas tanah tidak dirugikan³.

Adapun kendala yang dihadapi dalam melaksanakan fungsi sosial ini adalah masyarakat awam yang menganggap kepemilikan dari tanah

berlaku mutlak, artinya hak kepemilikannya tidak bisa diganggu gugat oleh siapa pun termasuk negara⁴. Konflik pertanahan menjadi isu nasional karena jumlahnya yang tinggi dan banyaknya kendala yang dihadapi dalam penyelesaiannya yang rumit dan tak kunjung mereda karena tidak adanya stabilitas politik dan otoritas pemerintah yang sangat tinggi juga menyebabkan masalah agraria terabaikan⁵. Pemerintah mempunyai kewajiban menyediakan tanah yang diperlukan untuk pembangunan, antara lain dari tanah negara yang tidak dikuasai oleh rakyat ataupun dengan menyediakan bank tanah bagi kepentingan pembangunan⁶.

Namun dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Siak dalam Perkara Perdata Nomor 37/Pdt.G/2018/PN.Sak antara Medan ribka BR surbakti dan Jonatan Ginting sebagai penggugat melawan tergugat KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Siak dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kasus penetapan ganti kerugian pembangunan untuk kepentingan umum, ketidakcermatan tim penilai dalam penyampaian tanah yang terdapat bangunan darurat tidak dihitung yaitu bangunan 4x5 Meter yang digunakan sebagai tempat usaha jual beli sawit karena ganti rugi yang diberikan tidak bisa untuk melakukan perpindahan usaha jual beli buah sawit yang menggunakan timbangan jenis digital, usaha tersebut sudah memiliki izin badan usaha dan memiliki sertifikat hak milik.

Karena ketidakcermatan penilai maka penilaian ganti rugi tersebut sangat tidak akurat dan berpotensi merugikan pemilik tanah. Hal ini maka pemerintah harus lebih cermat dan profesional lagi dalam melakukan penilaian ganti kerugian dengan menggunakan sumber daya manusia yang berpengalaman agar tidak merugikan para pemilik yang sudah

¹ Boedi Harsono, *Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 2008, hlm. 549.

² Lihat Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

³ Boedi Harsono, *Op.Cit.*, hlm. 66

⁴ Mudakir Iskandar Syah, *Dasar-Dasar Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Jala Permata, Jakarta, 2007, hlm. 5.

⁵ Suryanto, *Studi Identifikasi dan Inventarisasi Masalah Pertanahan, BPN Bekeja Sama dengan Lembaga Penelitian*, Univesitas Airlangga, Surabaya, 2001, hlm. 2.

⁶ Dekie GG Kasenda, "Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum", *Jurnal Morality*, Vol. 2, Desember 2015, hlm 2.

mau merelakan tanah miliknya untuk kepentingan umum. Pemerintah harus mengupayakan memberikan keadilan dalam penetapan harga tanah dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum agar tidak saling merugikan antara pemilik tanah dan pemerintah. Sehingga dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum diupayakan dengan cara yang seimbang dan ditempuh dengan cara musyawarah langsung dengan para pemegang hak atas tanah⁷.

Tetapi dalam mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah harus tercapai kesepakatan mengenai besaran ganti rugi, fakta nya tergugat tidak melakukannya dan dengan sewenang-wenang menentukan besaran ganti rugi dan tergugat tidak sama sekali memberikan kesempatan kepada penggugat untuk menyampaikan penawarannya versi warga penggugat serta lebih cenderung pemaksaan kehendak yang harus dituruti oleh Penggugat. Sehingga dalam melakukan suatu penilaian dari tergugat hanya menilai Rp. 25.913. dan Rp. 26.168 per meter tanah.

Dari fakta dalam putusan hakim ini dapat dikatakan terdapat unsur pemaksaan dari pemerintah untuk mendapatkan tanah tersebut serta dalam pemberian ganti kerugian belum memuat kata adil dan layak.

A. Identifikasi masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Siak dalam Perkara Perdata Nomor 37/Pdt. G/2018/PN. Sak tentang Penetapan Ganti Kerugian Pembangunan untuk Kepentingan Umum?
2. Apakah putusan hakim Pengadilan Negeri Siak dalam perkara perdata Nomor 37/Pdt. G/2018/PN. Sak tentang Penetapan Ganti Kerugian Pembangunan untuk kepentingan umum sudah sesuai dengan prinsip keadilan?

B. Metode

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah

⁷ Maria Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Kompas, Jakarta, 2007, hlm 80

penelitian hukum kepastakaan⁸ yang dilakukan dengan tujuan untuk menarik prinsip hukum dan untuk mencari kebenaran ilmiah yang teoretis atas masalah yang dibahas. Metode ini dilakukan dengan meneliti bahan-bahan hukum kepastakaan dan ditunjang dengan melakukan wawancara. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian terhadap sinkronisasi. Penelitian ini bertitik tolak dari bidang-bidang tata hukum tertulis tertentu, dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan didalam perundang-undangan tertentu⁹. Bahan hukum primer yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Putusan Pengadilan Negeri Siak Nomor 37/Pdt.G/2018/PN.Sak. Bahan hukum sekunder berbagai buku-buku, makalah, jurnal, dokumen resmi instansi dan data-data internet yang berkaitan dengan penelitian serta bahan tersier yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder, yakni Kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif dan lain sebagainya.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pertimbangan Putusan Hakim

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Rajagrafindo persada, Jakarta, 2007, hlm. 23

⁹ *Ibid*, hlm. 15.

Pengadilan Negeri Siak dalam Perkara Perdata Nomor 37/Pdt.G/2018/PN. Sak Tentang Penetapan Ganti Kerugian Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan atau *ex aquo et bono* dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus di sikapi dengan teliti, baik dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung¹⁰.

Suatu perkara perdata yang terdiri dari dua pihak yaitu ada penggugat dan tergugat yang berlawanan disebut *jurisdiciocontensiosa* atau peradilan yang sesungguhnya. Karena peradilan yang sesungguhnya maka produk pengadilan adalah putusan atau vonis¹¹. Dalam putusan ataupun surat gugatan lebih dikenal dengan tentang duduk perkara yang menjadi dasar yuridis gugatan atau mengurangi cara kronologis duduk perkaranya kemudian penguraian tentang hukumnya yang dijadikan dasar tuntutan, melainkan cukup hak atau peristiwa yang harus dibuktikan dalam persidangan nanti sebagai dasar dari tuntutan¹².

Bahwa gugatan para penggugat data yang diterima penggugat dalam daftar nilai ganti rugi berbeda-beda Medan Ribka Br Surbakti Nomor sertifikat hak milik 0748 luas tanah keseluruhannya adalah 5.996 M2 setelah dilakukan pengukuran oleh tergugat I maka tanah penggugat digunakan untuk jalan tol dengan luas 4.861 M2 dan berjalan nya waktu data tersebut berubah menjadi 2.540 M2 dan harga per meter tanahnya adalah Rp. 25.931,

¹⁰ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cetakan V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 140.

¹¹ Roihan A Rosyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 59.

¹² Fauzan Yusuf Hasibuan, *Hukum Acara Perdata*, Yayasan Pustaka Hukum Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 54

dengan alasan hasil setelah dikurangi 100 meter dari tengah jalan karena 100 meter kiri kanan jalan adalah merupakan hak dari PT. Chevron Pasifik Indonesia berdasarkan surat keputusan Nomor 091/48/59 Tanggal 5 Juni 1959 yang dikeluarkan oleh Gubernur Riau. Jonatan Ginting Nomor sertifikat hak milik 0079 luas tanah keseluruhannya 11.486 M2, bahwa setelah dilakukan pengukuran dan pendataan tergugat I maka tanah penggugat yang terkena jalan tol adalah 2.389 M2 dan berjalan nya waktu berubah dengan luas yang terkena jalan tol dengan ukuran 1.679 M2 dengan harga per meter nya Rp. 26.168 suatu perbedaan harga dari nilai per meter nya dengan sepadan tanah tersebut, dengan alasan bahwa tanah tersebut dengan luas 1.679 M2 adalah hasil dari dikurangi 100 meter dari pinggir jalan karena 100 meter dari pinggir jalan adalah merupakan tanah milik PT Chevron Pasifik Indonesia.

Namun dalam hal ini mengenai besaran ganti kerugian untuk jumlah nominal uang yang harus diberikan pada pemilik hak atas tanah tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum tersebut, karena dalam undang-undang hanya menyatakan bahwa dalam hal penggantian pembangunan untuk kepentingan umum dijelaskan pada Pasal 1 Ayat 2 yaitu pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara ganti kerugian yang layak dan adil diberikan kepada pihak yang berhak. Dalam mengenai ganti kerugian yang diatur dalam Pasal 1 Ayat 10 menyatakan bahwa ganti kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah. Selain itu, Pasal 9 Ayat 2 juga menyatakan bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil. Sehingga penulis menggunakan teori penafsiran hukum sebagai salah satu metode penemuan hukum untuk mengetahui makna dari undang-undang itu sendiri.

Dari peraturan perundang-undangan tersebut penulis menggunakan metode penafsiran fungsional atau

bebas, artinya penafsiran Disebut bebas karena penafsiran ini tidak mengikatkan diri sepenuhnya pada tata kebahasaan dari peraturan sebagai pegangannya. Melainkan, memformulasikan maksud sebenarnya dari suatu peraturan dengan berbagai sumber lain yang dianggap relevan. Dengan demikian, penafsiran ini mencoba untuk memahami maksud sebenarnya dari suatu peraturan dengan menggunakan berbagai sumber lain yang dianggap bisa memberikan kejelasan yang lebih memuaskan. Sehingga Kata adil dalam bahasa adalah sama rata, tidak sewenang-wenang dan kata layak menurut bahasa adalah wajar, terhormat dan patut¹³. Artinya suatu pemberian ganti kerugian pembangunan untuk kepentingan umum harus memberikan penggantian yang wajar dan tidak sewenang-wenang kepada pihak yang berhak. Selain itu, bahwa kata adil dalam bahasa arab 'adl yang mengandung pengertian sebagai berikut:¹⁴

1. Tidak berat sebelah atau tidak memihak ke salah satu pihak
2. Memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan hak dan kewajibannya yang harus diperolehnya.
3. Mengetahui hak dan kewajiban, mengerti mana yang benar dan mana yang salah, bertindak jujur dan tepat menurut peraturan atau syarat dan kaidah yang telah ditetapkan.
4. Tidak sewenang-wenang dalam memberikan hak dan kewajiban.

Keadilan secara leksikal berarti sama atau menyamakan, maupun setara. Menurut pandangan umum, keadilan yaitu menjaga hak-hak orang lain. Definisi keadilan ialah memberikan hak kepada yang berhak menerimanya. Keadilan merupakan suatu ukuran keabsahan suatu tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara. Perwujudan keadilan perlu diupayakan dengan memberikan

jaminan terhadap tegaknya keadilan.

Keadilan berasal dari kata adil, yang artinya tidak berat sebelah, tidak pandang bulu, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang kepada kebenaran, sepatutnya tidak sewenang-wenang.¹⁵ Keadilan adalah sifat perbuatan, perlakuan dan sebagainya yang adil. keadilan menjadi perhatian sejak zaman dahulu kala. Bangsa Yunani Kuno telah memiliki dewi yang khusus menangani keadilan yaitu themis.¹⁶ Themis digambarkan sebagai wanita yang memegang timbangan dan suatu untaian barang. Keadilan sering dibedakan dari hukum itu sendiri, terutama apabila orang tidak merasa puas dengan hukum yang ada. Oleh karenanya ada yang berpendapat bahwa tujuan hukum adalah keadilan.

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antar bangsa didunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi serta keadilan dalam hidup bersama atau keadilan sosial. Keadilan sosial adalah keadilan yang pelaksanaannya tergantung dari struktur proses ekonomi, politik, sosial, budaya dan ideologis dalam masyarakat. Keadilan sosial tidak hanya menyangkut upaya penegakan keadilan-keadilan tersebut melainkan masalah kepatutan dan pemenuhan kebutuhan hidup yang wajar bagi masyarakat. Jika diperhatikan ketentuan tentang ganti kerugian dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum selama ini cenderung merugikan pemegang hak atas tanah. Pada pasal 33 Undang-Undang nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan

¹³ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi 5, Grafindo, Jakarta, 2017, hlm. 255-708.

¹⁴ I Gde Suranaya Pandit, "Konsep Keadilan Dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik", *Jurnal Administrasi Publik*, Magister Administrasi Publik Universitas Warmadewa, No. 1, Vol. 1, Desember 2016, hlm. 14

¹⁵ Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Dengan Ejaan Yang Di Sempurnakan*, Eska Media, Jakarta, 2012, hlm. 206

¹⁶ Donald Albert Rumokoy and Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Grafindo Perkasa, Jakarta, 2014, hlm. 54

Untuk Kepentingan Umum dalam pelaksanaan penilaian oleh tim penilai dilakukan bidang per bidang yang meliputi: Tanah, Ruang atas tanah, bawah tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah dan atau kerugian lain yang dapat dinilai.

Pertama, kerugian yang diganti hanyalah kerugian fisik seperti tanah, bangunan dan tanaman saja, sedangkan kerugian non fisik tidak diperhitungkan. Kedua, dasar perhitungan besarnya ganti kerugian atas tanah bukan atas dasar harga sebenarnya atau harga pasar. Jika dikaitkan dengan Nilai Jual Objek Pajak data dari Dinas Pengolahan Keuangan Daerah pada tahun 2015 Nilai Jual Objek Pajak Tanahnya adalah Rp. 48.000 dan sebagai pembanding pada tahun 2016 dari objek tanah tersebut telah terjadi jual beli per meter tanah Rp. 600.000. jika dikaitkan dengan Nilai pasar merupakan dasar perhitungan yang sangat tepat dalam hal pemberian ganti rugi atas pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Jika dibandingkan dengan nilai jual objek pajak secara rasional untuk melindungi hak seseorang yang diambil hak atas tanahnya, setiap pembebasan tanah harus dilakukan dengan kompensasi yang layak dan untuk dapat dikatakan layak maka ganti kerugian minimal adalah sesuai dengan nilai pasar.¹⁷

Selain itu juga, dalam ganti rugi yang dikaitkan dengan layak dan adil disini adalah penggantian terhadap kerugian baik bersifat fisik dan atau non fisik sebagai akibat pengadaan tanah kepada yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman dan atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang dapat memberikan kelangsungan hidup yang lebih baik dari tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena pengadaan tanah.

Sehingga dalam perkara ini, bentuk penafsiran hukum yang dilakukan merupakan sebuah penafsiran atas keharusan mengambil pilihan dari berbagai metode penafsiran yang hasilnya berbeda. Akhirnya hakim hanya akan menjatuhkan pilihannya

berdasarkan pertimbangan metode manakah yang paling meyakinkannya.

2. Kesesuaian Putusan Hakim Terhadap Prinsip Keadilan Menurut Pengadilan Negeri Siak dalam Perkara Perdata Nomor 37/Pdt.G/2018/PN.Sak Tentang Penetapan Ganti Kerugian Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Berdasarkan Teori Keadilan, Keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam suatu sistem pemikiran. Keadilan tidak membenarkan pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang di perberat oleh sebagian besar keuntungan yang dinikmati banyak orang¹⁸. Oleh karena itu, dalam masyarakat yang adil kebebasan warga negara dianggap mapan, hak-hak yang dijamin oleh keadilan tidak tunduk pada tawar-menawar atau kalkulasi kepentingan sosial.

Menurut John Rawls, prinsip keadilan terdiri dari dua hal yaitu menyatakan bahwa setiap orang atau warga negara harus mendapatkan hak yang sama dari keseluruhan sistem sosial dalam mendapatkan kebebasan paling hakiki yang ditawarkan pada manusia. Kebebasan tersebut tertuang pada seperangkat hak yang melekat pada tiap individu, seperti hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk berasosiasi, hak untuk ikut serta aktif dalam sistem politik dan sosial dan hal tersebut harus berlaku secara sama pada setiap individu dan nilai keadilan tidak boleh ditawar dan harus diwujudkan ke dalam masyarakat tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat lainnya¹⁹. Prinsip kedua menyatakan bahwa

¹⁷ Supriadi, *Hukum Agraria Ed. 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 45.

¹⁸ John Rawls, *A Theory Of Justice Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm. 3.

¹⁹ Hyronimus Rhati, *Filsafat Hukum*, Edisi Lengkap dari klasik sampai PostModernisme, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2011, hlm 255

ketimpangan sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa agar memberikan keuntungan terbesar bagi kalangan yang paling tidak beruntung dalam masyarakat. Prinsip kedua memberikan kesempatan yang sama dalam keseluruhan sistem sosial, politik dan ekonomi. Tugas pemerintah, masyarakat dan individu menjadi mutlak untuk dijalankan demi memenuhi keseluruhan prinsip tersebut.

Konsep yang ideal ini dalam praktiknya tidak sesuai dengan kenyataan. Bentuk dan besaran ganti rugi yang diberikan kepada masyarakat masih jauh dari kelayakan, sehingga tidak heran dalam pelaksanaan telah menimbulkan konflik antara masyarakat pemilik tanah selaku penggugat dan pemerintah selaku tergugat atau orang yang membutuhkan tanah, karena ganti rugi yang diberikan oleh pemerintah tidak cukup atau tidak layak, bahkan tidak dapat dipergunakan untuk membeli tanah yang baru. Di samping itu, penampungan bagi warga masyarakat yang dicabut haknya tidak memenuhi harapan yang sesuai sehingga kegiatan usaha/mencari nafkah untuk memenuhi kehidupannya yang layak jauh lebih buruk bila dibandingkan dengan kehidupan sebelumnya.

John Rawls memberikan pandangan bahwa untuk mencapai suatu keadilan, di isyaratkan sekaligus adanya unsur keadilan yang substantif (*Justice*) dan unsur keadilan prosedural (*Fairness*)²⁰. Keadilan substansial di maknai sebagai keadilan yang secara nyata diterima dan dirasakan oleh para pihak yang dibebaskan tanahnya, sedangkan keadilan prosedural lebih berorientasi pada keadilan yang telah dirumuskan oleh hukum

dalam bentuk hak dan kewajiban²¹. Artinya bahwa, hukum akan menjadi adil apabila kedua macam keadilan tersebut dapat tercapai. Keadilan yang dirumuskan hukum dalam bentuk hak dan kewajiban harus mencerminkan keadilan yang diterima dan dirasakan oleh para pihak.

Jika pelaksanaan prinsip keadilan yang dirumuskan oleh John Rawls dihubungkan dengan pelaksanaan ganti rugi pembangunan untuk kepentingan umum yang dilakukan di Pengadilan Siak maka pemberian ganti kerugian yang dilakukan oleh pihak pemerintah kepada pihak yang berhak harus berdasarkan unsur keadilan yang substantif dan unsur keadilan prosedural. Artinya bahwa, keadilan substantif di maknai sebagai keadilan dalam pemberian ganti rugi yang diterima secara riil dan dapat dirasakan oleh para pihak yang berhak memperoleh ganti rugi, sementara keadilan prosedural lebih berorientasi pada keadilan yang telah dirumuskan oleh hukum.

Berdasarkan uraian prinsip keadilan untuk mengukur keadilan yang diterima masyarakat yang memperoleh ganti rugi pembangunan untuk kepentingan umum, penulis berpendapat bahwa teori yang mengisyaratkan unsur keadilan substantif dan prosedural sangat relevan digunakan. Keadilan yang diharapkan seharusnya keadilan yang substantif dan prosedural. Artinya, keadilan yang di maknai sebagai keadilan yang secara riil diterima dan dirasakan oleh para pihak, serta berorientasi pada keadilan yang telah dirumuskan oleh hukum dalam bentuk hak dan kewajiban tanpa mengorbankan sebagian masyarakat dan seharusnya dalam pemberian ganti kerugian dalam pembangunan untuk kepentingan umum ini dapat memperbaiki kondisi sosial ekonomi pemilik tanah yang mendapat ganti rugi dan paling tidak setara dengan keadaan sebelum pembangunan ini dilakukan dan pihak yang

²⁰ Mirza Amelia, Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Pada Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas 45 Mataram, Vol. 9, No. 2, Oktober 2018, hlm. 9.

²¹ Sahnun, *Op.cit*, hlm. 8.

membutuhkan tanah juga dapat memperoleh tanah sesuai rencana dan peruntukannya serta dapat memperoleh perlindungan hukum. Dengan demikian, keadilan yang dirumuskan oleh hukum dalam bentuk hak dan kewajiban dapat mencerminkan keadilan yang diterima dan dirasakan oleh para pihak.

D. Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan atau *ex aquo et bono* dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus di sikapi dengan teliti, baik dan cermat. Penafsiran merupakan kegiatan yang sangat penting dalam hukum. Penafsiran hukum oleh hakim dalam proses peradilan haruslah dilakukan atas prinsip-prinsip tertentu, yang menjadi dasar sekaligus rambu-rambu bagi hakim dalam menerapkan kebebasannya dalam menemukan dan menciptakan hukum.
2. Kesesuaian prinsip keadilan dalam penetapan ganti kerugian pembangunan untuk kepentingan umum, berdasarkan prinsip keadilan, maka pemberian ganti rugi pembangunan untuk kepentingan umum di Pengadilan Siak merupakan pemberian ganti rugi yang tidak adil, karena jika dihubungkan dengan keadilan substantif dan unsur keadilan prosedural, maka pemberian ganti rugi yang diberikan harus mencakup kedua keadilan tersebut. Artinya, keadilan yang di maknai sebagai keadilan yang secara riil diterima dan dirasakan oleh para pihak, serta berorientasi pada keadilan yang telah dirumuskan oleh hukum dalam bentuk hak dan kewajiban tanpa mengorbankan sebagian masyarakat.

Daftar Pustaka

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

- Harsono, Boedi, 2008, *Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- Harsono, Boedi, *Op.Cit.*
- Mudakir Iskandar Syah, 2007, *Dasar-Dasar Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Jala Permata, Jakarta.
- Suryanto, 2001, *Studi Identifikasi dan Inventarisasi Masalah Pertanahan, BPN Bekeja Sama dengan Lembaga Penelitian*, Univesitas Airlangga, Surabaya.
- Dekie GG Kasenda, “Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum”, *Jurnal Morality*, Vol. 2, Desember 2015.
- Sumardjono, Maria, 2007, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Kompas, Jakarta.
- Soekanto, soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Rajagrafindo persada, Jakarta, 2007, hlm. 23
- Arto,Mukti 2004, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cetakan V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Roihan, Rosyid, 2013, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Yusuf, Fauzan Hasibuan, 2006, *Hukum Acara Perdata*, Yayasan Pustaka Hukum Indonesia, Jakarta.
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi 5, Grafindo, Jakarta.
- I Gde Suranaya Pandit, “Konsep Keadilan Dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik”, *Jurnal Administrasi Publik*, Magister Administrasi Publik Universitas Warmadewa, No. 1, Vol. 1, Desember 2016,
- Kurnia, Tri Nurhayati, 2012, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Dengan Ejaan Yang Di Sempurnakan*, Eska Media, Jakarta.
- Albert, Donald Rumokoy and Frans Maramis, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*,Grafindo Perkasa, Jakarta.
- Supriadi, 2007, *Hukum Agraria Ed. 1*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rawls, John, 2011, *A Theory Of Justice Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Rhiti, Hyronimus,2011, *Filsafat Hukum*, Edisi Lengkap dari klasik sampai PostModernisme, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Mirza Amelia, Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Pada Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas 45 Mataram, Vol. 9, No. 2, Oktober 2018.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penetapan Ganti Kerugian